

**Analisis Framing Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto di Media
Online Hukumonline.com dan Tempo.Co**

Chandra Manumayasa

Magister Komunikasi Korporat Universitas Paramadina

chandra.manumayasa@students.paramadina.ac.id

ABSTRACT

This study uses Robert N. Entman's framing model analysis method to identify how the two online media present information and build narratives about the Hasto Kristiyanto case. The results of the study show that the media Tempo.co (Rizki, PDIP Determination of Hasto Kristiyanto Suspect Politicization of Law, 2024) and Hukumonline.com (Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto Becomes a Suspect, This is the Trace of His Involvement in the Harun Masiku Case, 2024) have differences in the framing used, which reflects the journalistic approach and ideology of each media.

Keywords: *determination of suspect, Hasto Kristiyanto*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman untuk mengidentifikasi bagaimana kedua media online tersebut mempresentasikan informasi dan membangun narasi tentang kasus Hasto Kristiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Tempo.co (Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024) dan Hukumonline.com (Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku, 2024) memiliki perbedaan dalam framing yang digunakan, yang mencerminkan pendekatan jurnalistik dan ideologi masing-masing media.

Kata Kunci: penetapan tersangka, Hasto Kristiyanto

PENDAHULUAN

Media online memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang kasus-kasus hukum. Isu hukum-politik di Indonesia selalu dinamis dan kompleks, sering kali menjadi sorotan publik dan media. Beberapa ciri dan data sekilas yang melatarbelakangi isu-isu ini antara lain:

1. Transisi Demokrasi Pasca-Reformasi: Sejak reformasi 1998, Indonesia berada dalam transisi menuju demokrasi yang lebih matang. Proses ini membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum dan politik, namun juga menyisakan tantangan, seperti konsolidasi demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
2. Tingginya Kasus Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah akut dan sistemik di Indonesia. Data dari berbagai lembaga menunjukkan tingginya angka korupsi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, parlemen, hingga lembaga penegak hukum itu sendiri. Transparency International (TI) misalnya, secara rutin merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di mana Indonesia masih perlu berjuang untuk meningkatkan peringkatnya. (Perlu dicatat: Data IPK 2023 menempatkan

Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 34, yang menunjukkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi).

3. Reformasi Hukum yang Belum Tuntas: Meskipun telah banyak dilakukan reformasi, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi kritik terkait independensi peradilan, kepastian hukum, dan akses keadilan. Isu-isu seperti jual beli kasus, lambatnya proses hukum, dan intervensi politik masih sering mencuat.
4. Politik Identitas dan Polarisasi: Dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang dan selama pemilihan umum (Pilpres dan Pilkada), politik identitas dan polarisasi politik semakin menguat. Isu-isu agama, etnis, dan kesukuan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi memecah belah masyarakat dan mempengaruhi isu hukum.
5. Peran Lembaga Negara: Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian sering menjadi pusat perhatian dalam isu hukum-politik. Keputusan atau tindakan dari lembaga-lembaga ini seringkali memiliki implikasi politik yang luas.
6. Pemanfaatan Hukum sebagai Alat Politik: Seringkali terjadi tuduhan bahwa hukum dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik atau melindungi kepentingan kelompok tertentu. Ini memunculkan keraguan publik terhadap imparialitas penegakan hukum.
7. Dinamika Legislasi: Proses pembuatan undang-undang di DPR seringkali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik, yang terkadang menimbulkan kontroversi dan demonstrasi publik (misalnya, RUU Cipta Kerja, revisi UU KPK).

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menjadi sorotan media online yaitu Hukumonline.com (Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024) dan Tempo.co (Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku, 2024). Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangannya penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penetapan tersangka Hasto tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 terkait perintangannya penyidikan dan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 terkait kasus suap pengurusan anggota DPR 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman untuk mengidentifikasi bagaimana kedua media online tersebut mempresentasikan informasi dan membangun narasi tentang kasus Hasto Kristiyanto. Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto menimbulkan polemik yang terjadi dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto sehingga banyak media massa yang memberitakan persoalan tersebut dengan penyajian yang bervariasi sesuai jenis medianya. Mulai dari Koran, Televisi, Radio, Instagram, Twitter, Youtube hingga Media Online.

Framing dalam komunikasi adalah proses bagaimana suatu isu atau peristiwa disajikan, dibingkai, atau direpresentasikan oleh media (atau komunikator lainnya) sedemikian rupa sehingga aspek-aspek tertentu dari realitas tersebut menjadi lebih

menonjol dibandingkan aspek lainnya. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi cara audiens memahami, menafsirkan, dan pada akhirnya, merespons informasi tersebut. Secara harfiah, "frame" berarti bingkai. Seperti sebuah bingkai foto yang memilih bagian mana dari gambar yang akan ditampilkan dan bagaimana fokusnya diarahkan, framing dalam komunikasi melakukan hal yang sama terhadap informasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman, yang terdiri dari empat elemen framing: definisi masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan solusi yang diusulkan. Analisis dilakukan terhadap berita-berita yang dipublikasikan oleh Hukumonline.com (Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024) dan Tempo.co (Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif dengan metode analisis framing berdasarkan model Robert N. Entman. Model ini berfokus pada empat fungsi utama framing yang dilakukan oleh media: *Define Problems* (mendefinisikan masalah), *Diagnose Causes* (mendiagnosis penyebab), *Make Moral Judgments* (membuat penilaian moral), dan *Suggest Remedies* (menawarkan solusi).

(Agatha Belva Marciana Edo, 2025) Framing memegang peranan penting dalam komunikasi media karena dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi khalayak. Melalui pembingkai, media dapat memusatkan perhatian khalayak pada aspek tertentu dan membentuk pemahaman yang diinginkan. Dengan menyesuaikan diri pada aspek atau rangkaian isu politik tertentu, mereka dapat mengklaim bahwa perkembangan opini publik mendukung kepentingan mereka atau konsisten dengan penafsiran mereka terhadap kebenaran.

(Setyaningsih, 2023) Negara bukan satu-satunya aktor di dunia yang global ini, dan informasi yang beredar di media tradisional dan sosial berasal dari berbagai aktor sosial, mulai dari perusahaan media melalui partai politik hingga sejumlah besar kelompok masyarakat yang sangat beragam, termasuk akar rumput.

(Putut Widjanarko, 2017) posting-an yang nyaring, marah, agresif, sensasional, atau bias akan mendapatkan attention lebih banyak, dgn karenanya menyebar lebih cepat. Percakapan hal-hal emosional (tentang agama, politik, bahkan juga bisa tentang klub bola atau pesohor favorit) di media sosial bisa cepat meluncur menjadi Pertarungan kerumunan yang marah satu sama lain. Algoritma mobokratis memberi ruang luas bagi penegasan dan penguatan ruang menggema dan bias konfirmasi anggota karumunan itu.

Analisis dalam penelitian ini adalah artikel berita yang secara spesifik membahas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang diterbitkan oleh Hukumonline.com dan Tempo.co pada periode waktu tertentu (misalnya, satu minggu setelah pengumuman penetapan tersangka). Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengunduhan artikel berita dari arsip online Hukumonline.com dan Tempo.co yang relevan dengan topik penelitian dan periode waktu yang ditentukan. Teknik analisis data (Berdasarkan Model Entman): analisis

data akan dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana hukumonline.com dan tempo.co menjalankan empat fungsi framing Entman dalam pemberitaan kasus Hasto Kristiyanto: permasalahan yang dikaji adalah : bagaimana masing-masing media mendefinisikan isu utama terkait penetapan tersangka. Apakah fokusnya pada aspek hukum, politik, etika, atau lainnya? Kata-kata, frasa, dan gambar apa yang digunakan untuk menggambarkan masalah ini?

Temuan dan Analisis (Struktur Berdasarkan Model Entman)

Framing di Hukumonline.com:

Permasalahan adalah analisis bagaimana hukumonline.com mendefinisikan isu penetapan tersangka. Apakah masalahnya difokuskan pada dugaan pelanggaran hukum, proses penyidikan, atau status hukum Hasto Kristiyanto? Kutipan atau bagian berita mana yang menonjolkan definisi masalah ini? Penyebab permasalahan adalah bagaimana hukumonline.com menjelaskan penyebab penetapan tersangka. Apakah penekanannya pada bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak berwenang, laporan saksi, atau prosedur hukum yang diikuti? Narasumber mana yang dikutip untuk menjelaskan penyebab ini? Analisis penilaian moral adalah apakah dan bagaimana Hukumonline.com menyampaikan penilaian moral. Apakah ada implikasi mengenai kepatuhan terhadap hukum, integritas pejabat publik, atau prinsip-prinsip keadilan? Memperhatikan penggunaan bahasa yang mungkin mengandung penilaian.

Framing di Tempo.co:

Permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana tempo.co mendefinisikan isu penetapan tersangka. Apakah masalahnya lebih ditekankan pada aspek politik, potensi kriminalisasi, atau dampak terhadap citra publik? Kutipan atau bagian berita mana yang menonjolkan definisi masalah ini? Penyebab permasalahanan identifikasi bagaimana tempo.co menjelaskan penyebab penetapan tersangka. Apakah penekanannya pada motif politik, adanya tekanan dari pihak tertentu, atau kelemahan dalam sistem hukum? Narasumber mana yang dikutip untuk menjelaskan penyebab ini? Penilaian moralnya adalah analisis apakah dan bagaimana tempo.co menyampaikan penilaian moral. Apakah ada implikasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan, independensi lembaga hukum, atau hak-hak individu? Perhatikan penggunaan bahasa yang mungkin mengandung kritik atau dukungan. Berdasarkan Model Entman: membandingkan bagaimana Hukumonline.com dan Tempo.co menjalankan keempat fungsi framing Entman. Identifikasi persamaan dan perbedaan dalam:

- Definisi masalah yang ditonjolkan.
- Penyebab yang dianggap paling relevan.
- Penilaian moral yang disampaikan.
- Solusi atau tindakan yang disarankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritis dalam Studi Framing Media

Penelitian ini akan melampaui deskripsi semata tentang bagaimana Hukumonline.com dan Tempo.co membingkai isu penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Dengan menggunakan kerangka model Robert N. Entman, analisis akan diperdalam untuk mengungkap dimensi kritis dari praktik framing media, terutama terkait dengan:

1. Posisi Media terhadap Kekuasaan

Analisis akan secara cermat menginvestigasi bagaimana hukumonline.com dan tempo.co memposisikan diri terhadap struktur kekuasaan (pemerintah, lembaga penegak hukum seperti KPK, partai politik, dan figur Hasto Kristiyanto sendiri sebagai representasi kekuasaan politik).

- PEMBERDAYAAN atau Kontrol: Apakah framing yang digunakan cenderung memberdayakan narasi kekuasaan yang ada atau justru berusaha melakukan kontrol dan kritik terhadapnya? Misalnya, dalam elemen *diagnose causes*, apakah media cenderung menyalahkan individu atau sistem, dan bagaimana pilihan ini merefleksikan sikap terhadap lembaga penegak hukum atau partai politik yang terlibat?
- Akses dan Prioritas Sumber: siapa narasumber yang dominan digunakan oleh masing-masing online tersebut? Apakah lebih banyak mengutip pernyataan dari pihak berkuasa (KPK, pemerintah) atau memberikan ruang yang substansial bagi suara-suara kritis (kuasa hukum, pihak Hasto, analis independen)? Pilihan sumber ini dapat mengindikasikan apakah media berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang selektif terhadap informasi atau sebagai "*watchdog*" yang kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
- Representasi Konflik Kekuasaan: jika ada indikasi konflik antar lembaga atau faksi dalam kekuasaan (misalnya, KPK vs. PDIP), bagaimana media membingkai konflik tersebut? Apakah ia menempatkan satu pihak sebagai "korban" atau "pelaku," atau mencoba menyajikan gambaran yang lebih seimbang?

2. Framing sebagai Refleksi Ideologi Redaksi

Setiap media memiliki ideologi, nilai-nilai, atau misi redaksi yang melekat, baik eksplisit maupun implisit, yang memengaruhi bagaimana berita diproduksi dan dibingkai. Analisis framing ini akan berupaya mengidentifikasi jejak ideologi tersebut dalam pemberitaan hukumonline.com dan tempo.co.

- Nilai Berita dan Sudut Pandang: Perbedaan fokus utama antara hukumonline.com (hukum dan regulasi) dan tempo.co (jurnalisme investigasi dan politik) secara inheren mencerminkan ideologi mereka. Bagaimana perbedaan ini termanifestasi dalam *define problems* dan *make moral judgments*? Apakah hukumonline.com cenderung menekankan aspek legal-prosedural, sementara tempo.co lebih menyoroti aspek moral-etik atau dampak politik dari kasus tersebut?
- Pilihan Leksikon dan Metafora: kata-kata, frasa, dan metafora yang digunakan (misalnya, "drama politik," "intervensi," "bersih-bersih") tidak hanya

deskriptif tetapi juga sarat makna ideologis. Analisis akan mencari pola dalam pilihan leksikon ini yang mengindikasikan posisi ideologis redaksi terhadap isu korupsi, kekuasaan, atau independensi lembaga hukum.

- Narasi yang Dibangun: framing yang konsisten dari waktu ke waktu terhadap isu hukum-politik dapat mencerminkan komitmen ideologis redaksi terhadap nilai-nilai tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, atau perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana narasi ini terbangun melalui keempat fungsi framing Entman dan apa implikasinya terhadap citra pihak-pihak yang terlibat?

3. Potensi pengaruh framing terhadap opini publik

Meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengukur dampak framing terhadap audiens, analisis kritis akan mengeksplorasi potensi dan arah pengaruh dari framing yang ditemukan terhadap opini publik.

- Pencitraan dan perseptual: bagaimana framing yang diidentifikasi dapat memengaruhi cara publik memandang Hasto Kristiyanto, KPK, atau partai politiknya? Apakah framing tersebut berpotensi membangun citra negatif atau positif, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas atau legitimasi mereka?
- Dukungan atau penolakan: dalam elemen *suggest remedies*, solusi atau rekomendasi yang ditawarkan media (atau tidak ditawarkan) dapat secara halus mengarahkan publik untuk mendukung atau menolak tindakan tertentu, kebijakan, atau bahkan hasil hukum. Misalnya, jika media hanya menyoroti sisi buruk proses hukum, ini bisa memicu ketidakpercayaan publik.
- Pembentukan agenda publik: Dengan secara konsisten membingkai isu Hasto Kristiyanto dengan cara tertentu, kedua media berpotensi menempatkan aspek tertentu dari kasus tersebut sebagai prioritas dalam agenda publik. Apakah framing mereka mendorong perdebatan tentang korupsi sistemik, independensi penegak hukum, atau justru lebih fokus pada aspek personal atau politis semata?

Dengan pendekatan analisis kritis ini, penelitian tidak hanya akan menguraikan bagaimana media membingkai berita, tetapi juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran media dalam ekosistem hukum-politik Indonesia, sebagai aktor yang aktif mengkonstruksi realitas dan berpotensi memengaruhi wacana publik. Artikel-artikel yang memenuhi kriteria (secara langsung membahas penetapan tersangka) akan diunduh dan dianalisis.

Tabel: daftar berita penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang dipublikasi Tempo.co dan Hukumonline.com

No	Tempo.co	Hukumonline.com
1.	(Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto jadi Tersangka Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku, 2024)	(Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024)

2.	(Yaputra, PDIP Menilai Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Sarat Rekayasa Politik, 2024)	(M. Agus Yozami, Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, PDIP: Tidak Ada Urgensi bagi KPK Lakukan Penahanan, 2025)
3	(Putra, Sikap PDIP Atas Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto, 2024)	(Rizki, Kembali Diperiksa KPK, Ini Strategi Hasto Kristiyanto Usai Ditetapakan Tersangka, 2025)

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana setiap artikel menjalankan empat fungsi framing Entman, misalnya, dalam mengidentifikasi pendefinisian masalah, peneliti akan mencari pernyataan atau penekanan utama mengenai apa yang dianggap sebagai isu sentral dalam pemberitaan. Untuk diagnosis penyebab, analisis akan fokus pada penjelasan yang diberikan mengenai mengapa penetapan tersangka ini terjadi dan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab. Penilaian moral akan diidentifikasi melalui penggunaan bahasa evaluatif atau implikasi mengenai benar atau salah. Terakhir, penawaran solusi akan dicari dalam bentuk saran atau implikasi mengenai tindakan selanjutnya yang perlu diambil. Proses analisis akan melibatkan interpretasi kualitatif terhadap teks berita dengan mengacu pada indikator-indikator yang relevan untuk setiap fungsi framing Entman. Perbandingan sistematis akan dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam bagaimana kedua media membingkai isu ini melalui keempat fungsi tersebut."

Kronologi kasus Hasto Kristiyanto merupakan tokoh politik dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (Partai demokrasi indonesia perjuangan) telah terlibat kasus dugaan suap dan perintangannya penyidikan dalam kasus Harun Masiku dimana peran Hasto disebut menitipkan uang Rp400 juta untuk keperluan suap Harun Masiku melalui staf pribadinya, Kusnadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempo.co (Yandhwiputra, Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku, 2024) lebih fokus pada aspek hukum dan prosedur penetapan tersangka, sementara hukumonline.com (Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024) lebih menekankan pada konteks politik dan dampaknya terhadap masyarakat. Perbedaan framing ini mencerminkan pendekatan jurnalistik dan ideologi masing-masing media.

Artikel tersebut, yang ditulis oleh Mochamad Januar Rizki pada 24 Desember 2024 di Hukumonline.com, memfokuskan isu penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dari sudut pandang PDI-P, yang menduga adanya politisasi hukum dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka tersebut. Beberapa poin penting dari definisi permasalahan ini adalah:

- DPP PDIP menduga penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangannya penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK memiliki aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.

- Artikel tersebut secara implisit mempertanyakan objektivitas dan netralitas KPK dalam menangani kasus ini, dengan menyoroti dugaan motif politik di balik penetapan tersangka.
- Fokusnya bukan hanya pada dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pada proses hukum yang dianggap tidak adil dan bermotif politik.

Sedangkan Artikel Tempo.co tersebut memfokuskan isu penetapan tersangka Hasto Kristiyanto pada:

- Dugaan pelanggaran hukum: artikel ini menyoroti dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku, termasuk memerintahkan staf untuk melobi KPU dan mengetahui adanya permintaan uang muka.
- Jejak keterlibatan: Artikel ini secara rinci menjelaskan jejak keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut, mulai dari perintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung hingga dugaan membantu pelarian Harun Masiku.

Kutipan yang menonjolkan definisi masalah

- Judul: "Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku" - judul ini secara langsung menyatakan status tersangka Hasto dan fokus pada jejak keterlibatannya.
- Paragraf pembuka: artikel ini dimulai dengan menjelaskan bagaimana kasus ini bermula dari perintah Hasto kepada tim hukum PDIP untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Ini menekankan dugaan keterlibatan awal Hasto dalam rangkaian peristiwa tersebut.
- Penjelasan tentang dugaan perintah: Artikel ini menjelaskan secara detail dugaan perintah Hasto kepada stafnya terkait dengan lobi ke KPU dan pengetahuan tentang permintaan uang muka. Ini menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Hasto.
- Dugaan membantu pelarian: Artikel ini juga menyebutkan dugaan Hasto membantu pelarian Harun Masiku, yang kembali menekankan pada dugaan pelanggaran hukum.

Diagnosa permasalahan:

Artikel tempo.co lebih menekankan pada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Hasto Kristiyanto sebagai penyebab penetapan tersangka, daripada motif politik, tekanan dari pihak tertentu, atau kelemahan sistem hukum. Meskipun demikian, ada sedikit nuansa yang mengarah pada potensi motif politik, tetapi bukan menjadi fokus utama.

- Dugaan pelanggaran hukum: artikel ini secara rinci menjelaskan dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku. Penekanannya adalah pada tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum, seperti memerintahkan staf untuk melobi KPU dan mengetahui adanya permintaan uang muka. Dugaan membantu pelarian Harun Masiku juga disoroti.
- Jejak Keterlibatan: Artikel ini menyajikan kronologi jejak keterlibatan Hasto, yang mengindikasikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada rangkaian peristiwa yang mengarah pada dugaan tindak pidana.

Sedangkan analisis bagaimana artikel Hukumonline.com berjudul "PDIP: Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024", mendiagnosis penyebab penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terutama dari sudut pandang PDI-P, dengan menekankan pada:

- **Motif Politik:** Artikel ini secara eksplisit menyebutkan dugaan PDI-P bahwa penetapan tersangka Hasto memiliki aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa PDI-P menganggap proses hukum terhadap Hasto tidak murni didasarkan pada fakta hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik.
- **Kelemahan dalam Sistem Hukum (Implisit):** Dengan menyoroti dugaan politisasi, artikel ini secara implisit mempertanyakan objektivitas dan netralitas KPK dalam menangani kasus ini. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap potensi kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya intervensi politik.

Narasumber yang Dikutip

DPP PDI-P: Artikel ini secara langsung mengutip pernyataan dari DPP PDI-P yang menduga adanya politisasi hukum dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Hasto. Artikel ini tidak secara eksplisit menyebutkan adanya tekanan dari pihak tertentu sebagai penyebab penetapan tersangka. Namun, dengan fokus pada dugaan motif politik, artikel ini menyiratkan bahwa ada faktor eksternal di luar proses hukum yang mempengaruhi penetapan tersangka Hasto.

Penyebab permasalahan:

Narasumber yang dikutip Tempo.co dimana dalam artikel tersebut, beberapa narasumber yang dikutip untuk menjelaskan penyebab penetapan tersangka antara lain:

- **KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi):** Meskipun tidak dikutip secara langsung, tindakan dan pernyataan KPK menjadi dasar utama dari narasi artikel. KPK adalah pihak yang menetapkan Hasto sebagai tersangka.
- **Tim Hukum PDIP:** Artikel menyebutkan perintah Hasto kepada tim hukum PDIP, yang menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa.
- **Sumber-sumber berita yang tidak disebutkan namanya:** Artikel ini mungkin merujuk pada dokumen pengadilan atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya untuk mendukung klaimnya.

Sedangkan artikel Hukumonline.com (Rizki, PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024)

1. **Motif Politik:** Artikel ini secara eksplisit menyampaikan dugaan dari DPP PDI-P bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka "kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi." Ini adalah poin utama dalam diagnosis penyebab permasalahan menurut perspektif yang diangkat oleh artikel tersebut.

Kelemahan dalam Sistem Hukum (Implisit): Dengan menyoroti dugaan politisasi, artikel ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya potensi

masalah dalam independensi lembaga penegak hukum atau celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya pengaruh politik dalam proses hukum.

2. Narasumber Penyebab Permasalahan:

Satu-satunya narasumber yang dikutip secara langsung dalam artikel ini untuk menjelaskan penyebab permasalahan adalah DPP PDI-P, melalui pernyataan mereka mengenai dugaan politisasi hukum dan kriminalisasi. Jadi, menurut artikel ini, penyebab utama penetapan tersangka Hasto Kristiyanto adalah dugaan adanya motif politik di baliknya, sebagaimana disampaikan oleh PDI-P. Artikel ini juga secara implisit menyinggung potensi kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya hal tersebut.

Penilaian Moral

Meskipun artikel tempo.co ini bersifat faktual, terdapat implikasi dan penggunaan bahasa yang dapat diinterpretasikan sebagai penilaian moral, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit:

- **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Artikel ini, dengan merinci jejak keterlibatan Hasto, secara implisit mengkritik potensi penyalahgunaan kekuasaan. Rincian perintah kepada staf dan pengetahuan tentang permintaan uang muka dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum.
- **Independensi Lembaga Hukum:** Artikel ini tidak secara langsung mempertanyakan independensi lembaga hukum, tetapi dengan menyajikan fakta-fakta yang memberatkan Hasto, secara tidak langsung menguatkan narasi bahwa proses hukum yang berjalan adalah sah dan berdasarkan bukti yang kuat.
- **Hak-hak Individu:** Artikel ini tidak secara eksplisit membahas hak-hak individu Hasto, tetapi dengan menekankan pada dugaan pelanggaran hukum, artikel ini secara implisit menempatkan kepentingan penegakan hukum di atas hak-hak individu dalam kasus ini.

Penggunaan Bahasa

- **Fokus pada "Jejak Keterlibatan":** Penggunaan frasa "Jejak Keterlibatan" dalam judul dan isi artikel mengindikasikan bahwa artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan menyoroti tindakan-tindakan Hasto yang dianggap bermasalah.
- **Rincian Perintah dan Pengetahuan:** Artikel ini menggunakan bahasa yang detail untuk menggambarkan perintah Hasto kepada staf dan pengetahuannya tentang permintaan uang muka. Detail ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Hasto memiliki peran aktif dalam dugaan pelanggaran hukum.
- **Penyebutan Dugaan Membantu Pelarian:** Penyebutan dugaan membantu pelarian Harun Masiku memiliki konotasi negatif dan mengimplikasikan adanya upaya untuk menghalangi proses hukum.

Sedangkan artikel Hukumonline.com berjudul "PDIP: Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum, 2024", secara implisit, menyampaikan penilaian moral

terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto, terutama dari sudut pandang PDI-P:

- Penyalahgunaan Kekuasaan (Implisit): Dugaan politisasi hukum dan kriminalisasi yang dilontarkan PDI-P mengimplikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang seharusnya netral, diduga digunakan untuk tujuan politik.
- Independensi Lembaga Hukum (Dipertanyakan): Artikel ini, dengan mengutip dugaan PDI-P, secara tidak langsung mempertanyakan independensi lembaga hukum, khususnya KPK. Dugaan politisasi mengindikasikan bahwa KPK mungkin tidak bertindak secara independen dan objektif dalam kasus ini.
- Hak-hak Individu (Implisit): Dugaan kriminalisasi mengimplikasikan bahwa hak-hak Hasto sebagai individu mungkin dilanggar. Jika penetapan tersangka didasarkan pada motif politik, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Hasto untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Penggunaan Bahasa

- "Politisasi Hukum" dan "Kriminalisasi": Penggunaan istilah "politisasi hukum" dan "kriminalisasi" memiliki konotasi negatif yang kuat. Istilah-istilah ini mengindikasikan bahwa proses hukum terhadap Hasto tidak adil dan bermotif politik.
- Dugaan: Artikel ini sering menggunakan kata "dugaan" ketika mengutip pernyataan PDI-P. Meskipun demikian, pengulangan dugaan ini tetap menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses hukum terhadap Hasto.

Secara keseluruhan, artikel ini, dengan mengutip pernyataan PDI-P, menyampaikan penilaian moral yang kritis terhadap proses penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Penilaian ini berfokus pada dugaan adanya motif politik, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan pertanyaan tentang independensi lembaga hukum, serta secara implisit menyentuh hak-hak individu.

Perbandingan Framing Berdasarkan Model Entman:

Fungsi *framing* Entman, dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, disajikan sebagai berikut:

Fungsi Framing Entman Hukumonline.com	Hukum online.com	Tempo.co	Persamaan	Perbedaan
Definisi Masalah yang Ditonjolkan	Menekankan dugaan politisasi hukum dan kriminalisasi	Lebih fokus pada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan	Keduanya mengakui penetapan tersangka Hasto sebagai	Hukumonline.com menyoroti aspek politis dan potensi penyalahgunaan

	dalam menetapkan tersangka, sejalan dengan sudut pandang PDI-P. Framing ini berpotensi mencitrakan lembaga penegak hukum sebagai alat kekuasaan politik, yang merefleksikan sikap kritis terhadap independensi hukum.	Hasto dan jejak keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku. Framing ini memperkuat narasi penegakan hukum dan akuntabilitas individu, yang dapat mencerminkan ideologi redaksi yang mendukung pemberantasan korupsi tanpa kompromi	masalah utama yang menjadi berita.	n kekuasaan (mempertanyakan independensi penegak hukum), sementara Tempo.co fokus pada aspek hukum dan tindakan Hasto (mendukung proses hukum).
Penyebab yang Dianggap Paling Relevan	Mengaitkan penyebab dengan motif politik (seperti yang dituduhkan oleh PDI-P) dan secara implisit, potensi kelemahan atau intervensi dalam sistem hukum. Hal ini menyiratkan adanya kekuatan di luar hukum yang memengaruhi proses,	Mengarahkan penyebab pada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Hasto dan jejak keterlibatannya dalam kasus yang relevan. Framing ini menekankan tanggung jawab individu dan efektivitas kerja lembaga penegak hukum, yang	Keduanya berusaha mengidentifikasi akar masalah di balik penetapan tersangka.	Hukumonline.com menekankan motif politik sebagai penyebab utama, mengisyaratkan bahwa kekuasaan mungkin menyalahgunakan hukum. Tempo.co fokus pada tindakan Hasto yang melanggar hukum, menempatkan kesalahan pada individu.

	berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap imparisialitas penegakan hukum.	dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang transparan.		
Penilaian Moral yang Disampaikan	Secara implisit mengkritik proses hukum, mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, mempertanyakan independensi lembaga hukum, dan menyiratkan potensi pelanggaran hak-hak individu. Framing ini berpotensi membangkitkan empati publik terhadap Hasto sebagai "korban" politisasi, yang merefleksikan posisi redaksi yang berhati-hati terhadap kekuatan negara.	Secara implisit mengkritik potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Hasto dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan, serta kurang menekankan pada hak-hak individu. Framing ini berpotensi membentuk persepsi publik bahwa tindakan Hasto tidak etis atau melanggar hukum, dan proses penegakan hukum berjalan sesuai koridornya.	Keduanya menyampaikan penilaian moral terhadap situasi atau pihak yang terlibat, meskipun secara implisit.	Hukumonline.com lebih kritis terhadap proses hukum dan mempertanyakan independensi lembaga. Tempo.co lebih fokus pada tindakan Hasto yang dianggap salah dan mendukung proses penegakan hukum.

Solusi atau Tindakan yang Disarankan	Artikel ini, yang berfokus pada pandangan PDI-P, secara implisit menyarankan agar proses hukum dilakukan secara adil dan bebas dari pengaruh politik. Ini mendorong publik untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum, merefleksikan peran media sebagai pengawas kekuasaan	Artikel ini, dengan menekankan pada jejak keterlibatan Hasto, secara implisit mendukung penegakan hukum dan proses peradilan yang sedang berlangsung. Ini berpotensi memperkuat dukungan publik terhadap tindakan lembaga penegak hukum, yang sejalan dengan ideologi redaksi yang mendukung supremasi hukum.	Keduanya secara implisit menyarankan tindakan atau harapan terkait kelanjutan proses hukum.	Hukumonline.com menyarankan keadilan, netralitas, dan kebebasan dari intervensi politik, sementara Tempo.co menyarankan penegakan hukum yang berlanjut dan penyelesaian kasus berdasarkan bukti.
--------------------------------------	---	---	---	--

KESIMPULAN:

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Hukumonline.com dan Tempo.co membingkai isu penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dengan cara yang berbeda secara signifikan. Hukumonline.com cenderung menonjolkan narasi politisasi hukum dan kriminalisasi, mengkritik proses hukum serta independensi lembaga penegak hukum. Sebaliknya, Tempo.co fokus pada dugaan pelanggaran hukum Hasto, menekankan tanggung jawab individu dan mendukung proses penegakan hukum. Perbedaan ini terlihat jelas di keempat fungsi framing Entman (definisi masalah, penyebab, penilaian moral, dan solusi).

Secara Ilmiah: Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa ideologi redaksi dan posisi media terhadap kekuasaan (eksekutif, politik, penegak hukum) secara

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 5 No 4 (2025) 757-772 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v5i4.8724

fundamental membentuk konstruksi realitas dalam pemberitaan. Ini menunjukkan bahwa framing adalah cerminan pilihan sadar media dalam menyampaikan informasi.

Secara Praktis: Perbedaan framing ini memiliki potensi besar memengaruhi persepsi dan opini publik terhadap kasus hukum-politik yang kompleks. Media dapat mengarahkan pandangan publik, baik ke arah simpati atau dukungan terhadap penegakan hukum, menggarisbawahi kekuatan media sebagai pembentuk opini.

DAFTAR PUSTAKA

- Edo, A. B. (2025). Pembangkaian alur film dokumenter studi kasus film dokumenter "ice cold: murder,cofee, and Jessica Wongso".
- Putra, N. (2024, December 24). *Sikap PDIP Atas Penetapan Tersangka Hasto Kristtiyanto*. Diambil kembali dari tempo: <https://www.tempo.co/politik/sikap-pdip-atas-penetapan-tersangka-hasto-kristtiyanto-1185751>
- Putra, N. (2024, Desember 24). *Sikap PDIP Atas Penetapan Tersangka Hasto Kristtiyanto*. Retrieved from [www.tempo.co: https://www.tempo.co/politik/sikap-pdip-atas-penetapan-tersangka-hasto-kristtiyanto-1185751](https://www.tempo.co/politik/sikap-pdip-atas-penetapan-tersangka-hasto-kristtiyanto-1185751)
- Putut Widjanarko, P. (2017). *Media Sosial yang beradab*. Tempo.
- Rizki, M. J. (2024, Desember 25). *PDIP Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Politisasi Hukum*. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pdip--penetapan-tersangka-hasto-kristiyanto-politisasi-hukum-lt676b959df1f9c/?page=all>
- Rizki, M. J. (2025, Januari 13). *Kembali Diperiksa KPK, Ini Strategi Hasto Kristiyanto Usai Ditetapkan Tersangka*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kembali-diperiksa-kpk--ini-strategi-hasto-kristiyanto-usai-ditetapkan-tersangka-lt6784cfac66407/>
- Setyaningsih, R. W. (2023). Praktik Transframing dan strategi penerjemahan berita terkait. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 21*.
- Yandhwiputra, A. R. (2024, Desember 24). *Hasto Kristiyanto jadi Tersangka Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku*. Retrieved from [www.tempo.co: https://www.tempo.co/hukum/hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-ini-jejak-keterlibatannya-dalam-kasus-harun-masiku-1185446](https://www.tempo.co/hukum/hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-ini-jejak-keterlibatannya-dalam-kasus-harun-masiku-1185446)
- Yandhwiputra, A. R. (2024, Desember 24). *Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Ini Jejak Keterlibatannya dalam Kasus Harun Masiku*. Retrieved from [tempo.co: https://www.tempo.co/hukum/hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-ini-jejak-keterlibatannya-dalam-kasus-harun-masiku-1185446](https://www.tempo.co/hukum/hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-ini-jejak-keterlibatannya-dalam-kasus-harun-masiku-1185446)
- Yaputra, H. (2024, Desember 24). *PDIP Menilai Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Sarat Rekayasa Politik*. Retrieved from [www.tempo.co: https://www.tempo.co/politik/pdip-menilai-penetapan-tersangka-hasto-kristiyanto-sarat-rekayasa-politik-1185653](https://www.tempo.co/politik/pdip-menilai-penetapan-tersangka-hasto-kristiyanto-sarat-rekayasa-politik-1185653)
- Yaputra, H. (2024, Desember 24). *PDIP Menilai Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Sarat Rekayasa Politik*. Retrieved from [tempo.co: https://www.tempo.co/politik/pdip-menilai-penetapan-tersangka-hasto-kristiyanto-sarat-rekayasa-politik-1185653](https://www.tempo.co/politik/pdip-menilai-penetapan-tersangka-hasto-kristiyanto-sarat-rekayasa-politik-1185653)
- Yozami, M. A. (2025, Februari 20). *Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, PDIP Tidak Ada Urgensi bagi KPK Lakukan Penahanan*. Retrieved from [Hukumonline: https://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)